

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE  
PADA PERUSAHAAN INFOBANK15 PERIODE 2017-2020**

**Larasati Era Putri Anggun Pramesti, Francis M. Hutabarat**  
*email: larasatipramesti11@gmail.com, fmhutabarat@unai.edu*  
**Universitas Advent Indonesia**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam rentang waktu 3 tahun yaitu pada periode 2017 sampai 2020. Proksi *Corporate Governance* yang diterapkan dalam penelitian ini ialah: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai variabel yang akan diuji. Variabel terikat (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Metode Kuantitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi 15 perusahaan perbankan (BBCA, BBNI, BBRI, BDMN, PNB, SDRA, BMRI, BNGA, BNLI, BTPN, BTPS, MEGA, NISP, BJBR, BJTM) dengan sumber data berasal dari *annual report* yang diperoleh dengan mengakses *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta masing-masing situs perusahaan. Merujuk pada hasil olah data yang telah dilakukan, di dapati bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara untuk variabel komite audit diperoleh hasil yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Kata Kunci:** Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Tax Avoidance.

*Abstract*

*The aims of this research is to examine and determine whether the Corporate Governance has an influence on tax avoidance in INFOBANK15 companies listed on the IDX (Indonesian Stock Exchange) in a period of 3 years, namely in the period 2017 to 2020. The Corporate Governance proxies applied in this research are: Institutional Ownership, Independent Commissioner, and Audit Committee as variables to be tested. The dependent variable (tax avoidance) in this research was measured using the Effective Tax Rate (ETR). Quantitative method is the method that used in this research with a population of 15 banking companies (BBCA, BBNI, BBRI, BDMN, PNB, SDRA, BMRI, BNGA, BNLI, BTPN, BTPS, MEGA, NISP, BJBR, BJTM) with data sources coming from the annual report obtained by accessing the website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and each company's website. Referring on the results of data processing that has been carried out, the results show that the institutional ownership variable has a significant positive effect on tax avoidance, the independent commissioner variable has a significant negative effect on tax avoidance, while for the audit committee variable has insignificant results on tax avoidance.*

**Keywords:** Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Tax Avoidance

## PENDAHULUAN

Berdasarkan CIA World Factbook (2021) Indonesia tengah berada di posisi keempat terbesar dengan jumlah penduduk 275,122,131 jiwa. Dari data tersebut Indonesia tentu memiliki harapan yang besar bagi rakyatnya untuk dapat selalu bersatu dan melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat demi kemajuan negara. Salah satu yang menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia ialah wajib pajak. Pengertian wajib pajak dari segi hukum ialah pendapatan yang diterima dari kewajiban yang dilaksanakan oleh warga dalam menyeter sejumlah penghasilan tertentu bagi negara dan hal ini timbul karena adanya hukum serta undang-undang yang berlaku dimana negara memiliki hak untuk memaksa serta menggunakan uang pajak tersebut guna penyelenggaraan pemerintahan (Amin & Suyono, 2020).

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia dimana dapat dipergunakan dalam pembiayaan belanja negara. Hal ini tentunya dapat membantu untuk mendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, serta kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun sangat disayangkan, melihat kenyataan yang ada bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidaklah berbanding lurus dengan pendapatan pajak. Berkaca dari catatan 5-10 tahun terakhir diketahui bahwa target penerimaan pajak selalu sulit untuk dicapai.

Dalam perusahaan banyak yang lebih mementingkan agar memiliki nilai laba yang maksimal. Penerapan sistem penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai salah satu metode dalam mengurangi beban. Pada perusahaan, pajak dianggap sebagai beban pengeluaran yang mampu

mengurangi laba dari perusahaan. Semakin meningkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak perusahaan yang wajib di bayarkan kepada negara. Namun pada dasarnya bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dapat disamakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini dikarenakan *tax avoidance* bersifat sah dan legal (*lawful*) serta kegiatannya tetap dilakukan dengan mematuhi ketentuan peraturan pajak yang berlaku (Purbowati, 2021). Penghindaran pajak itu sendiri menjadi suatu hal yang bersifat unik dan rumit bagi masing-masing perusahaan. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun bagi beberapa pihak hal tersebut sangat tidak diinginkan khususnya bagi pemerintah. Dalam satu dekade terakhir ini Otoritas Pajak Indonesia diketahui tengah fokus dan terus berupaya untuk mampu memberikan batasan secara spesifik antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak guna mencegah wajib pajak masuk pada arah yang salah dan melanggar peraturan itu sendiri.

Amin & Suyono, (2020) memaparkan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya ialah *Corporate Governance*. Pada dasarnya *Corporate Governance* menjadi suatu mekanisme dalam perusahaan guna melakukan sesuatu yang benar, dengan menggunakan cara yang benar (*doing the right things right*). Itu berarti dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* harus berlandaskan pada hal-hal yang benar tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Penerapan praktik *good corporate governance* meliputi 5 prinsip utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*. Kelima hal tersebut sangat penting adanya karena terbukti dapat meningkatkan kualitas dalam laporan

keuangan pada perusahaan. Adapun proksi *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini ialah, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi baik dari pemerintah, yayasan, perusahaan investasi, dana pensiun, lembaga keuangan seperti asuransi dan bank, serta institusi lainnya yang layaknya seperti sebuah perusahaan. Kepemilikan saham institusional merupakan presentasi dari kepemilikan institusi dan kepemilikan *blockholder*, dimana persentasenya ialah lima persen (5%) untuk perorangan atau individu serta bukan kelompok dari kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari persentase saham pada institusi di akhir tahun. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pihak manajemen perusahaan, kepemilikan institusional dianggap memiliki peranan yang penting dalam hal tersebut. Semakin tinggi jumlah kepemilikannya sudah barang tentu akan memudahkan para pemegang saham untuk mengawasi praktik manajerial sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam perusahaan ataupun tindakan manajemen terkait tindakan penghindaran pajak serta meningkatkan ketersediannya informasi yang relevan dalam perusahaan. Teori ini didukung oleh penelitian Pasaribu & Siahaan (2020), Rasmita & Wahidahwati (2021) dimana hasil penelitian mereka memaparkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Itu berarti semakin tinggi kepemilikan saham institusional maka cenderung jumlah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan akan semakin rendah.

Komisaris independen secara umum memiliki definisi sebagai seseorang yang dapat berdiri sendiri,

tidak terpengaruh oleh siapapun dan dalam hal apapun dengan pengendali pemegang saham. Komisaris independen bukanlah seseorang yang memiliki hubungan pribadi tertentu dengan pihak direksi atau komisaris, serta bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai direktur pada perusahaan yang terkait. Hadirnya komisaris independen di bawah kepemimpinan dewan komisaris dapat berfungsi dalam memantau tata kelola perusahaan agar menghasilkan laporan keuangan secara lebih akurat serta mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Semakin tinggi jumlah persentase dewan komisaris independen itu berarti semakin tinggi juga badan independen yang dimiliki perusahaan yang tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pemegang saham pengendali dimana hal tersebut mampu mempengaruhi kepada kebijakan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada suatu perusahaan. Terkait hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Riziqiyah & Pramuka (2021) sangat mendukung dimana dengan adanya tanggung jawab tugas yang dimiliki oleh komisaris independen dapat mencegah adanya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purbowati (2021) dimana kebijakan *tax avoidance* pada perusahaan tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah dari komisaris independen. Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa tanggung jawab dari komisaris independen hanyalah sebatas memantau namun hasil keputusan sepenuhnya berada pada pihak manajemen perusahaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) akan tetap terjadi dalam perusahaan.

Komite Audit menjadi salah satu komite operasi utama dewan direksi

dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap laporan dan pernyataan tanggung jawab keuangan. Sesuai dengan penelitian Rasmita & Wahidahwati (2021) p mengungkapkan bahwa komite audit ialah anggota komite yang mampu bekerja sama dan mampu mengemban tanggung jawab yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian intern maupun komite audit berjalan dengan efektif serta mampu mempertanggung jawabkannya kepada dewan komisaris. Dalam perusahaan setidaknya terdapat tiga orang dengan dua orang eksternal independen dalam komite audit. Seorang komite audit haruslah seorang yang berpengalaman di bidang keuangan atau akuntansi agar mampu menghasilkan laporan yang jujur dan akurat serta dapat meminimalisir adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didukung oleh penelitian Riziqiyah & Pramuka (2021) dimana penelitian tersebut memaparkan terkait variabel komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah proporsi dari komite audit yang dimiliki perusahaan maka akan semakin rendah jumlah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

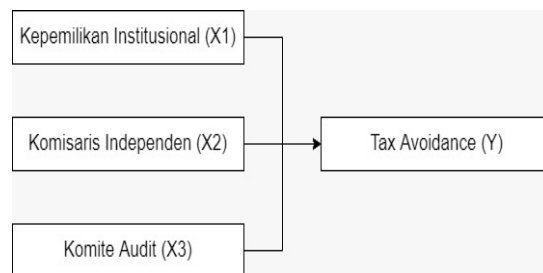
Berdasarkan pemaparan dan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap *corporate governance* dimana proksi yang akan digunakan ialah komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini ialah :

H1 : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :



## METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Fadjarenie & Anisah (2016) menerangkan terkait metode kuantitatif yang sangat tepat digunakan dalam menulis karya ilmiah karna dianggap sudah memenuhi dasar-dasar ilmiah yang akurat, terperinci dan terstruktur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari *annual report* perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi penelitian merupakan 15 perusahaan perbankan dari periode 2017-2020 dengan total keseluruhan berjumlah 60 data dimana dalam pengolahan data peneliti menggunakan software SPSS. Uji analisis statistik deskriptif, uji multikolienaritas, uji autokorelasi, uji norrmalits, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan Uji T menjadi teknik analisis yang digunakan oleh

peneliti dalam menganalisis data secara statistik. Adapun yang menjadi variabel dependen (Y) atau variabel terikat dalam penulisan ini ialah *Tax Avoidance* dan sebagai Variabel Independen (X) atau variabel bebas ialah kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

*Tax Avoidance* ialah tindakan yang dianggap legal atau sah untuk dilaksanakan oleh para pihak wajib pajak, hal ini dilakukan dengan melihat adanya kesempatan atau celah-celah dari lemahnya atau ketidakpastian hukum mengenai pengurangan beban pajak pada perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumusan Tarif Pajak Efektif (ETR) menggunakan rumusan:

ETR = Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak

Dengan hadirnya Variabel Kepemilikan Institusional hal ini dapat memberikan informasi terkait jumlah kepemilikan saham pemerintah baik yang dimiliki oleh lembaga hukum, lembaga keuangan, maupun lembaga luar negeri. Pada dasarnya Kepemilikan Institusional bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen pada perusahaan. Kepemilikan Institusional dapat dihitung menggunakan rumusan:

INST = Jumlah Kepemilikan Saham Institusi/Jumlah Saham Yang Beredar

Komisaris Independen pada dasarnya adalah perseorangan yang tidak memiliki hubungan khusus maupun langsung terhadap pengendali pemegang saham, direksi, maupun komisaris. INDP dalam perusahaan dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pada

perusahaan. Rumus perhitungan untuk variabel Komisaris Independen ialah:

INDP = (Jumlah Komisaris Independen/Jumlah Seluruh Dewan Komisaris) x 100%

Komite Audit ialah badan yang bekerja di bawah naungan Dewan Direksi perusahaan yang bertugas untuk memberikan pemahaman mengenai akuntansi serta hal-hal yang terkait dengan kebijakan keuangan. Variabel KA diukur dengan melihat jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan (Amin & Suyono, 2020).

KA = Jumlah Komite Audit

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna memaparkan variabel-variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam menghasilkan determinasi secara konvensional. Berikut ialah hasil statistik deskriptif dari penelitian ini dengan menggunakan software SPSS.

Tabel 1.  
Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviatio n
TA	60	.01	.49	.2488	.06544
INST	60	.07	1.00	.6469	.33319
INDP	60	.33	.75	.5299	.10867
KA	60	2.00	7.00	4.0000	1.27559
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 1 didapati hasil analisis statistik deskriptif. Tertera bahwa jumlah keseluruhan data yang digunakan ialah berjumlah 60 data. Dari hasil tersebut didapati bahwa Mean pada variabel Kepemilikan Institusional adalah 64,69%. Dimana nilai minimum INST 0,07 yang merupakan nilai dari perusahaan BJBR dan nilai maksimum 1,00 yang adalah nilai dari perusahaan NISP. Untuk variabel Komisaris Independen menghasilkan nilai mean sebesar 52,99%. Hasil minimum INDP ialah 0,33 yang terdapat pada perusahaan BBKA, BDMN, PNB dan BJBR, sementara nilai maksimum INDP ialah 0,75 yang terdapat pada perusahaan SDRA dan BJTM. Pada variabel kualitas audit diperoleh nilai mean sebesar 4%, dimana hasil minimum KA ialah 2 yang terdapat pada perusahaan BBNI dan BTPN, sementara untuk nilai maksimum KA adalah 7 yang terdapat pada perusahaan BBRI serta BMRI.

Tabel 2.  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INST	.904	1.106
	INDP	.960	1.042
	KA	.935	1.069

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Berdasarkan hasil uji didapati bahwa nilai tolerance lebih besar dari > 0,10 yang berarti tidak terjadi mutikolinearitas dan melihat semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih

kecil dari < 10. Dapat disimpulkan bahwa uji dapat diterima dan tidak terbentuk multikolinearitas.

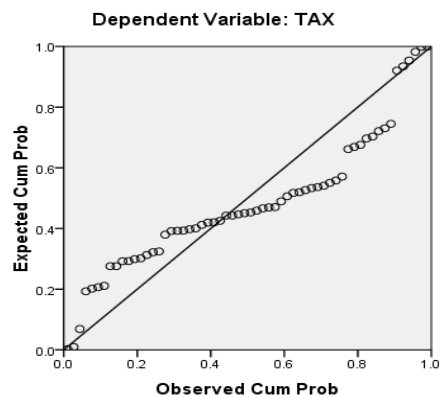
Tabel 3.  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	Durbin-Watson
1	1.507

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui uji autokorelasi diketahui nilai DW adalah 1.507 di mana nilai tersebut berada di antara -2 dan 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dan hasil uji dapat diterima.

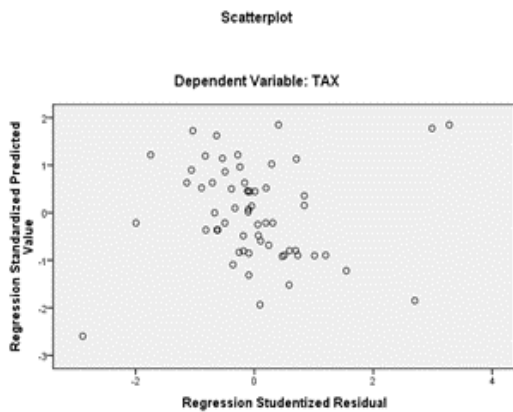
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1.

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Berdasarkan uji Heterokedastisitas maka didapati bahwa titik plot berada di antara garis diagonal serta mengikuti arah garis yang berarti data terdistribusi normal.



Gambar 2.

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Mengacu pada hasil uji heterokedastisitas maka didapati bahwa titik plot tersebar dan tidak membentuk pola, maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil uji dapat diterima dan tidak terdapat heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.315	.054
INST	.048	.025
INDP	-.162	.075
KA	-.003	.006

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Mengacu pada perolehan data melalui SPSS 25 maka diketahui persamaan analisis linear berganda ialah:  
 $Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3$

$$TA = 0.315 + 0.048 INST - 0.162 INDP - 0.003 KA$$

Nilai Konstanta 0.315 menunjukkan apabila seluruh variabel bebas (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit) bernilai 0, itu berarti nilai variabel terikatnya (*tax avoidance*) sebesar konstanta 0.315. Nilai koefisien regresi dari variabel kepemilikan institusional ialah 0.048, hal ini mengindikasikan bila setiap adanya kenaikan 1% pada variabel INST maka akan menyebabkan peningkatan sebesar 0.048 pada variabel *tax avoidance* dengan indikasi variabel independen lainnya bernilai tetap. Nilai koefisien regresi dari variabel komisaris independen ialah negatif 0.162, hal ini mengindikasikan bawa setiap adanya kenaikan 1% pada variabel INDP maka akan menyebabkan penurunan sebesar -0.162 pada variabel *tax avoidance* dengan indikasi variabel independen lainnya bernilai tetap. Nilai koefisien regresi dari variabel komite audit ialah negatif 0.003, itu berarti setiap adanya perubahan kenaikan 1% pada variabel KA maka akan menyebabkan penurunan sebesar -0.003 pada variabel *tax avoidance* dengan indikasi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 5

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.415 <sup>a</sup>	.172	.06111	

a. Predictors: (Constant), KA, INDP, INST

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat melalui hasil nilai adjusted  $R^2$  (Sanchez & Mulyani, 2020).

Dari hasil uji diperoleh nilai  $R^2$  ialah 0,128 atau dalam persentase sebesar 12,8%. Maka diketahui dalam penelitian ini variabel INST, INDP, serta KA hanya dapat mempengaruhi variabel dependen TA sebesar 12,8%. Sementara itu terdapat 87,2% variabel lain yang mampu mempengaruhi variabel *tax avoidance* namun tidak masuk dalam variabel penelitian ini.

#### Uji F

Tabel 6  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.044	3	.015	3.887	.014
Residual	.209	56	.004		
Total	.253	59			

a. Predictors: (Constant), KA,

INDP, INST

b. Dependent Variable:

TA

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Merujuk pada hasil uji F yang dilakukan maka didapatkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (TA) pada perusahaan

BANK15 yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020 dengan nilai sig. 0,014 di level signifikansi 5% dan nilai F-test sebesar 3,887.

#### Uji T

Tabel 7  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	t	Sig.
1 (Constant)	5.819	.000
INST	1.928	.059
INDP	-2.162	.035
KA	-.475	.637

Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti (2022)

Setelah melalui uji asumsi klasik serta uji signifikan F dan analisis regresi linear berganda maka diketahui bahwa seluruh data terdistribusi normal dan dapat diterima mengacu pada penelitian di perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

Merujuk pada Output Uji T (Tabel 7) didapatkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X1) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap TA dengan nilai signifikansi 0,059 di level signifikan 10%, yang berarti semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan INFOBANK15 periode 2017-2020 yang terdaftar di BEI maka akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan, maka hipotesa 1 ( $H_1$ ) diterima. Hasil ini menunjukkan adanya keselarasan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanchez & Mulyani (2020), Lestari & Ovami (2020), dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang



signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel PDKI (X2) diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap TA dengan nilai signifikan 0.035 di level signifikansi 5%. Bisa disimpulkan bila semakin meningkat jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka semakin rendah peluang praktik penghindaran pajak dalam pelaporan perpajakan kepada negara pada perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Maka diketahui bahwa hipotesa 2 (H<sub>2</sub>) diterima. Sependapat dengan hasil penelitian Kholis, (2021) serta Wardoyo et al., (2022) dimana komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rasmita & Wahidahwati (2021), Riziqiyah & Pramuka (2021), serta Amin & Suyono (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan *tax avoidance* pada perusahaan tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah dari komisaris independen. Tanggung jawab dari komisaris independen hanyalah sebatas memantau namun hasil keputusan sepenuhnya berada pada pihak manajemen perusahaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan praktik *tax avoidance* akan terjadi.

Pada variabel Komite Audit (X3) diperoleh hasil tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (TA). Dibuktikan melalui hasil sig. 0,637 di level signifikansi 0,050. Maka diketahui bahwa hipotesa 3 (H<sub>3</sub>) ditolak, yang berarti komite audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020 tidak dapat meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh

Yohan & Pradipta (2019) dan Wardoyo et al.(2022) dimana komite audit tidak mampu menghindari adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional menghasilkan pengaruh yang signifikan positif terhadap Tax Avoidance, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan maka semakin meningkat pula hak suara para pemegang saham untuk dapat mengawasi dan membatasi adanya tindakan manipulasi khususnya dalam laporan keuangan. Melalui perihal itu pastinya akan berakibat pada menurunnya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan karena dengan mekanisme monitoring yang ketat kepada pihak manajerial maka cenderung manajer tidak akan mengambil keputusan secara sembarangan khususnya dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Komisaris Independen menghasilkan pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan INFOBANK 15 yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen maka akan berdampak pada semakin rendahnya peluang praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Menilik dari tanggung jawab komisaris independen dalam mengontrol manajemen agar tetap sejalan dengan aturan dan hukum yang berlaku terkait kebijakan tarif pembayaran pajak kepada pemerintah, melalui hal ini tentunya akan

berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Variabel Komite Audit diketahui tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan INFOBANK 15 yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Perihal ini dapat terjadi dengan kemungkinan komite audit dalam perusahaan tidak memiliki kualitas yang baik serta tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam memeriksa pihak manajemen terkait pelaporan keuangan karena pada dasarnya komite audit seharusnya mampu untuk meminimalisir terdapatnya aksi penghindaran pajak yang sanggup dilakukan oleh pihak manajemen.

Anjuran bagi periset berikutnya agar mampu mencari serta menghasilkan penemuan-penemuan yang baru dan juga melakukan penelitian pada sektor perusahaan lainnya sehingga memperoleh hasil riset yang lebih terbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248–259.
- Fadjarenie, A., & Anisah, Y. A. N. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *STAR - Study & Accounting Research*, XIII(3), 48–58.  
[www.idx.co.id%0Awww.stiestembi.ac.id/?&c=jurnal-star](http://www.idx.co.id%0Awww.stiestembi.ac.id/?&c=jurnal-star)
- Kholis, N. U. R. (2021). *CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP*. 23(2), 217–228.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Pasaribu, D., & Siahaan, S. B. (2020). *Jurnal manajemen*. 6. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Putra, Y. E. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi , Kualitas Corporate Governance Dan Other Comprehensive Income Terhadap Tax Avoidance*. 5(3), 433–446.
- Rasmita, N. U., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).  
<http://eprints.perbanas.ac.id/7673/>
- Riziqiyah, M., & Pramuka, B. (2021). *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Metiya Fatikhatur Riziqiyah The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia*. 21(1), 9–18.
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Webinar Nasional Cendekiawan*, 1(1), 1–8.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>

- Wardoyo, D., Krismelina, S., & Aulya, S.  
(2022). 3) 1,2,3. 1(8), 469–476.  
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa,  
Leverage, Komite Audit, Size, Sales  
Growth Terhadap Tax Avoidance.  
*Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 1–  
8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>